**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-buku**

Abdul Azis Wahab, *Pendidikan Pancasila I*, Universitas Terbuka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2002

Achmad Muthali’in, *Bias Gender dalam Pendidikan,* Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001

Aim Abdulkarim, *Penuntun Belajar PPKn 2,* Ganeca Exact, Bandung, 1995

Anas Urbaningrum, *Jangan Mati Reformasi,* Penerbit : Yayasan Cita Mandiri Indonesia, Jakarta, 1999

Anshari Thayib, Arief Affandie, Hermawan Malik, Bambang Parianom, Pusat Kajian Strategis Dan Kebijakan (PKSK), *Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama*, Surabaya, 1997

Bambang Arumanadi, & Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, IKIP Semarang Press, 1990

Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik,* Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Esmi Warasih Pujirahayu, *Implementasi Kebijaksanaan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis,* Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1991

Gadis Arivia, *Filsafat Bersfektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif,* Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006

I.S. Susanto, *Lembaga dan Pranata Hukum,* Purwokerto, 2003

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia Publishing, Malang, 2010

Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum,* Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004

Machmud, Amir, *Pembangunan Politik Dalam Negeri Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007

Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme,* Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2010

Roeslan Saleh, *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungan Jawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Krangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Perbit UI, 2010

Soehino, *Hukum Tata Negara,* Yogyakarta : Liberty, 1985

Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, PT. itra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Sulistyowati Irianto, dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan Di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006

Uni Satia Rahayu dan Siti Noor Laila, *Sepatu Lars di Rahim Ibu,* Grafika Indah, Jakarta, 2004

Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia : Dasar-Dasarnya,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia* : *Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996

1. **Jurnal, Makalah, Website**

Jati Nugroho, *Perlindungan Hukum Perempuan Di Bidang Politik dalam Perjuangan Melawan Ketidakadilan Gender,* Jurnal MUWÂZÂH, Vol. 3, No. 2, Desember 2011

Ita F. Nadia, *Ketidak Adilan Gender Sebagai Akar Diskriminasi*, Makalah dalam Seminar Ilmiah Dalam Rangka Lustrum VI/Dies Natalis XXX AKS Tarakanita Yogyakarta, 8 Maret 1997

Ilyas, Ulfa, 2009, “Perempuan dalam Pemilihan Umum 2009”. [Online] Tersedia di *http://mediabersama.com/index.php?option=com* Diakses pada tanggal 12 Februari 2014

Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945* Makalah Disampaikan Pada: SEMINAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL VIII Diselenggarakan Oleh BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI Denpasar, 14-18 Juli 2003

Jimly Asshidiqie, *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya,* Disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama”. Jakarta, 27 Nopember 2007

Junita Budi Rahman, *Perempuan di dalam Negara Maskulin Indonesia; dalam Rangka Peningkatan Keterwakilannya di Parlemen,* (Makalah) Pusat Penelitian Peranan Wanita–Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 2004

Komisi Pemilihan Umum, *Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2004*; dalam www.kpu.go.id yang diakses pada tanggal 16 Februari 2014

1. **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum